

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai negara dengan kondisi ekonomi tengah berkembang Indonesia kerap melakukan kegiatan ekspor dan impor dimana memerlukan dukungan baik dari segi terpenuhinya kebutuhan bahan baku ataupun terpenuhinya jumlah barang jadi yang kemudian akan diekspor maka dengan begitu perekonomian nasional akan meningkat. Indonesia kerap melakukan impor limbah demi mencapai terpenuhinya kebutuhan dari perindustrian daur ulang. Industri daur ulang telah dinilai menjadi salah satu penyumbang devisa atau pemasukan bagi ekonomi negara. Sehingga negara berkepentingan untuk memposisikan peran serta tanggungjawabnya dalam sektor perindustrian guna untuk menjaga kestabilan perekonomian yang sedang tumbuh. Maka campur tangan negara menghasilkan kebijakan yang mengatur ketentuan impor limbah tersebut. Maka dari itu dengan kebijakan tersebut diharapkan agar tidak menimbulkan atau menambah dampak buruk terhadap lingkungan ketika limbah impor masuk ke dalam negeri. Kebijakan yang ada mengarahkan kita untuk melihat bagaimana implementasi berjalan dimana ini merupakan bentuk dari perpanjangan peran negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, peneliti berhasil memperoleh jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan teori Edwards III yakni implementasi kebijakan yang terdiri atas empat faktor antara lain komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi, struktur birokrasi.

Pada faktor komunikasi, ditemukan bahwa adanya kesalahpahaman terhadap beberapa pasal menjadi alasan yang cukup berpengaruh. Hal ini terkait dengan isi kandungan dari limbah yang akan diimpor. Adanya multiinterpretasi diantara pihak-pihak yang berkaitan akan proses impor limbah ini mempengaruhi adanya limbah impor tersisipi bahan berbahaya beracun (B3) karena ketidakpahaman terhadap pasal yang termuat.

Kemudian untuk faktor Sumberdaya manusia, terkait kuantitas dan kualifikasi berdasarkan hasil penelitian di bea cukai Tanjung Priok menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam isu limbah impor ini. Kuantitas dan kualitas yang belum sepenuhnya terpenuhi mempengaruhi seberapa cepat proses penanganan limbah impor B3 oleh pihak yang terkait terutama di pelabuhan Tanjung Priok dimana merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk.

Selanjutnya dalam perihal faktor Disposisi dimana menjalankan kebijakan sikap taat memang diperlukan akan tetapi tidak cukup jika tidak diikuti oleh sikap mengawasi yang benar pula. Maka dari itu pengawasan yang lemah dan gagal menyebabkan adanya ratusan kontainer limbah B3 lolos untuk dikirim. Terhitung kembali dari awal 2019 bahkan hingga pertengahan 2020 sudah ditemukan sebanyak 1078 kontainer terkontaminasi limbah B3 menumpuk di Tanjung Priok.

Dan terakhir dari faktor Struktur birokrasi, melihat berdasarkan data bahwa komoditas impor terbesar yang masuk ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Priok bukan limbah impor melainkan komoditas lain menyebabkan isu limbah impor tidak menjadi skala prioritas utama dalam pengamanan atau pengawasan lanjutan, sehingga tidak ada operasi gabungan serta tindakan ataupun

keputusan bersama secara langsung ketika diawal permasalahan limbah impor B3 ditemukan. Terjadinya ketidaksiapan kerjasama dan keputusan bersama ini mengakibatkan lambatnya koordinasi penyebaran tanggung jawab antar badan atau lembaga satu sama lain sehingga mengakibatkan adanya penundaan dalam menyikapi kasus masuknya limbah impor terutama bagi limbah impor B3.

4.2 Saran

Penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan impor limbah berjalan dimana kebijakan tersebut merupakan bentuk kepentingan negara dalam mengintervensi aspek ekonomi negara. Penelitian ini telah menggunakan empat faktor implementasi kebijakan dari Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi untuk melihat hasil kebijakan ini.

Sebagai saran kedepan bahwasanya penelitian ini masih terdapat kekurangan. Adapun kekurangan yang dimaksud ialah penelitian ini terbatas pada deskripsi ataupun penjabaran mengenai kebijakan ketentuan limbah impor B3 di pelabuhan Tanjung Priok serta implementasinya. Maka dari itu sebagai saran untuk penelitian kedepannya, yaitu dengan adanya penelitian lanjut mengenai perbandingan efektivitas dari kebijakan limbah impor terdahulu dengan kebijakan yang sudah diperbaharui di Indonesia atau dapat berupa analisa kebijakan ketentuan dalam mengekspor limbah ke negara lain dari negara pengekspor. Hal ini mengingat perlunya mengetahui apakah implementasi dari sebuah kebijakan sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya memiliki hambatan yang mempengaruhi ketidakefektifan dari kebijakan tersebut dan berdampak pada aspek lainnya.